

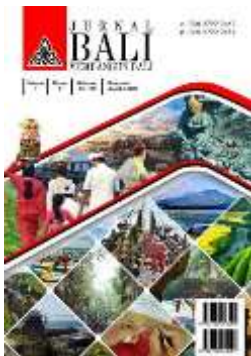


Strategi Pemerintah Provinsi Bali dalam Menekan Kemiskinan melalui Program Pasar Murah

I Putu Arys Julyandika

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

email: putuarys@gmail.com



Sejarah Artikel

Diterima pada
23 Juni 2026

Direvisi pada
6 Juli 2026

Disetujui pada
27 Juli 2026

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis program pasar murah sebagai instrumen stabilisasi harga sekaligus intervensi perilaku dalam pengentasan kemiskinan.

Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dan analisis kebijakan, dengan kerangka teori perilaku menurut Creswell yang menekankan interaksi antara kebijakan, lingkungan, dan respons masyarakat.

Hasil dan pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar murah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi harga, tetapi juga mampu membentuk perilaku konsumsi masyarakat, meningkatkan ekspektasi terhadap peran negara, serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga rentan. Pembaruan penelitian ini terletak pada penguatan konsep pasar murah sebagai instrumen perilaku ekonomi, bukan sekadar intervensi distribusi.

Implikasi: Transformasi program pasar murah menuju sistem digital, berbasis data kemiskinan, serta integrasi dengan kebijakan pengendalian inflasi daerah.

Kata Kunci: kemiskinan, stabilisasi harga, pasar murah, kebijakan perilaku, Bali

Abstract

Purpose: This study aims to analyze the strategic role of the low-cost market program as an instrument for price stabilization and behavioral intervention in poverty alleviation.

Research methods: This study employs a descriptive qualitative method based on a literature review and policy analysis, using Creswell's behavioral theory framework, which emphasizes the interaction among policy, the environment, and community responses.

Results and discussion: The findings indicate that the low-cost market program serves not only as a price stabilization mechanism but also as an instrument capable of shaping consumer behavior, strengthening public expectations regarding the role of the state, and enhancing the economic resilience of vulnerable households. The novelty of this study lies in strengthening the conceptualization of the low-cost market as an instrument of economic behavioral intervention, rather than merely as a distributional intervention.

Implication: The transformation of the low-cost market program toward a digital, poverty-data-driven system, integrated with regional inflation control policies.

Keywords: poverty, price stabilization, low-cost market, behavioral policy, bali

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan pembangunan yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dengan kemampuan rumah tangga dalam



memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan publik, upaya penanggulangan kemiskinan karena itu tidak cukup hanya diarahkan pada peningkatan pendapatan, tetapi juga perlu memperhatikan kemampuan masyarakat mempertahankan daya beli ketika terjadi perubahan harga kebutuhan pokok. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Bali No.13/02/51/Th.XX 5 Februari 2026, per bulan September 2025 Provinsi Bali merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia yaitu sebesar 3,42% (160,09 ribu jiwa).

Bali memiliki konsep Tri Hita Karana yang berarti menjaga keseimbangan manusia dengan tuhan (*parahyangan*), menjaga keseimbangan antar manusia (*pawongan*) dan menjaga keseimbangan manusia dengan lingkungannya (*palemahan*) (Mudana *et al.*, 2018; Mudana *et al.*, 2023a; Mudana *et al.*, 2023b; Mudana *et al.*, 2024). Tri Hita Karana ini tidak hanya menjadi budaya tetapi juga telah diterapkan dalam berbagai kebijakan pembangunan yang dilakukan di Bali. Program Pasar Murah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali merupakan aksi nyata dari nilai pawongan yaitu menjaga tingkat kesejahteraan melalui akses yang adil terhadap kebutuhan pokok masyarakat.

Program Pasar Murah merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam menyediakan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Pasar murah dilaksanakan pada hari-hari tertentu, seperti saat terjadi kenaikan harga atau menjelang hari raya besar keagamaan baik lokal maupun nasional. Dari segi kebijakan publik, pasar murah dapat dikategorikan sebagai instrumen intervensi langsung yang bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat rentan.

Berdasarkan kondisi tersebut, tulisan ini bertujuan menganalisis peran stabilisasi harga bahan pokok dalam pengendalian kemiskinan di Provinsi Bali, mengkaji pengaruh ketimpangan wilayah terhadap tingkat kemiskinan di Bali serta dampaknya terhadap penentuan target kebijakan pasar murah dan menganalisis pengaruh program pasar murah terhadap perilaku masyarakat berdasarkan pendekatan teori perilaku menurut Creswell.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran kebijakan pasar murah dalam stabilisasi harga bahan pokok serta kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji suatu fenomena pada kondisi yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrument utama serta menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui

analisis terhadap berbagai sumber informasi. Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik. Beberapa karakteristik yang dapat disebutkan adalah peneliti memiliki derajat sama dengan subjek penelitian, kesamaan dalam berinteraksi, deskripsi secara detail tentang kejadian, situasi, fenomena, dan mengutamakan kualitas partisipan dari segi pengalaman (Waruwu, 2023). Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena kebijakan publik secara komprehensif, termasuk aspek perilaku masyarakat sebagai dampak dari intervensi kebijakan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, LKJIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025, serta artikel ilmiah dari jurnal nasional yang terkait dengan topik stabilisasi harga dan kemiskinan. Data tersebut dipilih berdasarkan keterkaitan, kredibilitas, dan informasi terbaru.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis spasial sederhana, yaitu dengan membandingkan kondisi kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali, khususnya wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi seperti Karangasem dan Buleleng. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas kebijakan pasar murah berdasarkan karakteristik wilayah. Dengan demikian, metodologi penelitian ini tidak hanya menekankan pada analisis kebijakan, tetapi juga mengintegrasikan aspek perilaku dan konteks lokal Bali, sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam mendukung pengentasan kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stabilisasi Harga Bahan Pokok sebagai Instrumen Pengendalian Kemiskinan di Bali

Kemiskinan di Provinsi Bali dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2025, garis kemiskinan Bali sebesar Rp642.986 per kapita per bulan, dengan komponen makanan mencapai Rp445.225 atau 69,24%. Tingginya proporsi komponen makanan menunjukkan bahwa perubahan harga pangan berpotensi memberikan tekanan yang relatif besar terhadap rumah tangga berpendapatan rendah. Bukti empiris tingkat nasional juga menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan dapat meningkatkan tekanan kemiskinan di Indonesia (Faharuddin *et al.*, 2023). Dalam kondisi ini, stabilisasi harga bahan pokok menjadi instrumen strategis dalam pengendalian kemiskinan. Perspektif keberlanjutan sistem pangan menempatkan keterjangkauan pangan sebagai bagian dari sistem pangan yang lebih luas (Béné *et al.*, 2019).

Berdasarkan data yang diambil dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025, perkembangan harga kebutuhan bahan pokok sebesar 8,7% diatas target yang ditetapkan yaitu 9% dan capaian ini sudah lebih baik dari capaian tahun 2024 yaitu sebesar 9,9% dan lebih baik dari target yang ditetapkan nasional yaitu 10%. Seperti digambarkan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perkembangan Harga Kebutuhan Bahan Pokok

KOMODITI	Satuan	Maret	Juni	Sept	Des	Rata-rata	Std-Dev	Kovar
2	3	6	9	12	15	16	17	18
Beras Medium I	Kg	14.341	14.046	14.750	14.479	14.427	251	1,7
Beras Super I	Kg	15.889	15.952	15.881	15.765	15.864	176	1,1
Beras Medium (Beras SPHP)	Kg	11.905	11.824	11.783	11.914	11.857	103	0,9
Beras Premium	Kg	15.581	15.459	15.833	15.576	15.623	145	0,9
Minyak Goreng	Liter	19.352	19.694	19.964	20.038	19.725	320	1,6
Daging Babi	Kg	107.509	100.190	86.475	87.176	98.415	8996	9,1
Daging Sapi Has Luar	Kg	21.667	17.708	119.167	118.261	119.244	1245	1
Daging Ayam Ras	Kg	40.044	39.372	42.600	41.204	40.319	1201	3
Telur Ayam Ras	Kg	28.104	27.799	28.115	28.224	28.150	498	1,8
Cabai Merah Besar	Kg	53.346	25.149	42.422	29.204	40.457	14113	34,9
Cabai Rawit Merah	Kg	7.233	64.365	33.116	57.018	52.498	26061	49,6
Bawang Merah	Kg	39.221	34.307	31.690	41.722	37.115	5373	14,5
Bawang Putih	Kg	40.421	33.217	31.691	33.581	35.487	3351	9,4
Kangkung	Kg	8.019	6.722	6.522	6.656	7.044	733	10,4
Jeruk Lokal	Kg	15.546	15.210	15.219	16.016	15.666	688	4,4
Ikan Tongkol	Kg	29.731	31.500	31.170	32.235	30.955	1116	3,6
Kacang Panjang	Kg	12.561	17.041	11.473	10.278	12.814	2251	17,6
Pisang Ambon	Kg	16.752	17.084	16.898	17.780	17.217	396	2,3
Gulaku/Merk Sejenis (Putih)	Kg	18.366	18.369	17.902	17.809	18.387	957	5,2
Tepung Terigu Segitiga Biru	Kg	12.497	12.570	12.524	12.370	12.485	97	0,8
KOVAR								8,7

[Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali (diolah)]

Pemerintah Provinsi Bali melalui pelaksanaan pasar murah, berupaya menjaga keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat. Kebijakan ini menjadi penting terutama pada hari besar keagamaan yang cenderung memicu kenaikan harga dan juga pada saat terjadi lonjakan harga komoditas tertentu. Dengan demikian, stabilisasi harga melalui intervensi pasar tidak hanya berfungsi menjaga keseimbangan ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan sosial terhadap kelompok masyarakat rentan

Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali melaksanakan 18 kali kegiatan pasar murah. Pasar Murah ini dilaksanakan di semua kabupaten/kota pada saat menjelang hari raya keagamaan, pengendalian inflasi dan saat terjadi lonjakan harga komoditas tertentu. Pasar murah ini juga melibatkan berbagai

stakeholder terkait seperti Bulog, Pertamina, Distributor, Perumda dan UMKM lokal dilokasi pelaksanaan pasar murah. Adapun lokasi pelaksanaan pasar murah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Lokasi pelaksanaan pasar murah tahun 2025

NO	WAKTU	LOKASI
1	7 Februari 2025	Desa Pejeng Kangin Kec Tampak Siring Gianyar
2	18 Februari 2025	Desa Pakseballi Kec Dawan Klungkung
3	12 Maret 2025	Desa Mekar Bhuwana, Kec Abiansema Badung
4	24 Maret 2025	Desa Patas Kec Gerokgak Kab Buleleng
5	16 April 2025	Desa Sanding, Kec Tampaksiring Gianyar
6	17 April 2025	Desa Kayubihi Kec Bangli Kab Bangli
7	30 April 2025	Desa Dukuh Kec Kubu Karangasem
8	23 Mei 2025	Gedung Mario Tabanan
9	18 Juni 2025	Lapangan Desa Pergung Kec Mendoyo Jembrana
10	25 Juli 2025	Depan Monumen Ida Dewa Agung Jambe Klungkung
11	29 Juli 2025	Desa Baturinggit Kec Kubu Karangasem
12	12 Agustus 2025	Desa Batuan Kec Sukawati Gianyar
13	27 Agustus 2025	Desa Pancasari Kec Sukasada Buleleng
14	19 September 2025	Desa Sulahan Kec Susut Bangli
15	16 Oktober 2025	Desa Besakih Kec Rendang Karangasem
16	25 November 2025	Desa Sidan Kec Gianyar Kab Gianyar
17	26 November 2025	Jl Untung Surapati Klungkung
18	16 Desember 2025	Gereja Katolik Katedral Denpasar

[Sumber Data: Disperindag Provinsi Bali]

Program pasar murah merupakan salah satu bentuk intervensi langsung pemerintah dalam akses mendapatkan barang kebutuhan pokok. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar. Selain itu, keberadaan pasar murah juga memberikan efek tidak langsung terhadap mekanisme pasar, yaitu dengan menekan potensi spekulasi harga oleh pelaku distribusi. Penelitian-penelitian yang menjelaskan bagaimana desain lingkungan pilihan dapat mendorong masyarakat mengambil keputusan tertentu menunjukkan bahwa perubahan lingkungan pembelian dapat memengaruhi pilihan konsumen, meskipun efeknya bergantung pada konteks intervensi (Harbers *et al.*, 2020).

Analisis Spasial: Ketimpangan Wilayah dan Target Lokasi Kebijakan di Bali

Sebaran kantong-kantong kemiskinan di Provinsi Bali menunjukkan pola spasial yang tidak merata. 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Bali yaitu Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng, memiliki tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah selatan seperti Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Bali tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor geografis dan akses terhadap sumber daya, termasuk bahan pangan. Wilayah dengan akses distribusi yang terbatas cenderung mengalami harga bahan pokok yang lebih tinggi dan fluktuatif.

Dalam konteks ini, pelaksanaan pasar murah memiliki dampak yang lebih besar pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Oleh karena itu, kebijakan pasar murah seharusnya tidak dilakukan secara merata, melainkan menggunakan pendekatan berbasis wilayah, dengan prioritas pada daerah kantong kemiskinan seperti Karangasem dan Buleleng,

Analisis Perilaku Masyarakat Berdasarkan Pendekatan Creswell

Berdasarkan teori perilaku menurut Creswell, kebijakan publik dapat mempengaruhi perilaku masyarakat melalui interaksi antara faktor lingkungan, stimulus kebijakan, dan respons individu. Thaler dan Sunstein (2021) menjelaskan bahwa perubahan *choice architecture* dapat memengaruhi keputusan tanpa menghilangkan kebebasan memilih. OECD (2017, 2019) juga menempatkan *behavioral insights* sebagai pendekatan untuk memperbaiki desain dan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks penelitian ini, pasar murah berfungsi sebagai stimulus yang mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Pertama, dari aspek persepsi, masyarakat menunjukkan peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah sebagai aktor yang hadir dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kedua, dari aspek perilaku konsumsi, masyarakat menjadi lebih rasional dalam mengelola pengeluaran, termasuk dengan memanfaatkan akses pasar murah dan menghindari perilaku konsumsi berlebihan atau *panic buying*. Ketiga, dari aspek adaptasi sosial ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan menjadi lebih mampu bertahan dalam kondisi tekanan inflasi. Dengan demikian, pasar murah tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga membentuk perilaku adaptif masyarakat. OECD menekankan pentingnya konteks, informasi, dan bias perilaku dalam desain kebijakan berbasis perilaku (OECD, 2017).

Temuan ini menunjukkan bahwa pasar murah dapat dikategorikan sebagai instrumen kebijakan berbasis perilaku (*behavioral policy*), yang tidak hanya mengintervensi harga, tetapi juga mempengaruhi cara masyarakat merespons kondisi ekonomi.

Inovasi Kebijakan: Model “Pasar Murah Presisi Bali”

Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keberlanjutan program, diperlukan transformasi kebijakan pasar murah dari pendekatan konvensional menjadi berbasis sistem. Salah satu model yang diusulkan dalam karya tulis ini adalah “Pasar Murah Presisi Bali”, yang mencakup:

- a) Target penerima manfaat pasar murah berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional). Inpres Nomor 4 Tahun 2025 menetapkan DTSEN sebagai basis integrasi data sosial-ekonomi untuk mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran. Prinsip penargetan berbasis data sejalan dengan kebutuhan pengukuran kemiskinan yang konsisten dan tepat waktu untuk mendukung kebijakan perlindungan sosial (World Bank, 2025).
- b) Digitalisasi bantuan melalui *e-voucher* atau *QR code* menggunakan pola subsidi/CSR. Dalam kebijakan konsumen, penyajian informasi digital perlu mempertimbangkan keterbatasan perhatian dan pemrosesan informasi masyarakat (OECD, 2017).
- c) Lokasi prioritas pasar murah fokus pada kantong kemiskinan
- d) Monitoring harga secara *real-time* dengan mengoptimalkan aplikasi SIGAPURA dan SP2KP
- e) Penguatan kerjasama antar daerah dalam rantai pasok

Model ini diharapkan lebih tepat sasaran, sehingga dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan menjadi lebih optimal. Studi mengenai keterjangkauan pangan di Indonesia menunjukkan pentingnya memperhatikan variasi pola konsumsi dan harga dalam menilai akses pangan (Costlow *et al.*, 2025).

SIMPULAN

Kemiskinan di Provinsi Bali sangat terkait dengan stabilitas harga komoditas bahan pokok, dimana komponen makanan menyumbang lebih dari 68% terhadap garis kemiskinan. Kondisi ini menegaskan bahwa fluktuasi harga pangan bukan hanya fenomena ekonomi, melainkan faktor utama kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Dalam konteks tersebut, program pasar murah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali telah menjadi instrumen stabilisasi harga sekaligus mekanisme perlindungan sosial. Kebijakan ini tidak hanya mampu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi pangan, tetapi juga ikut berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan daerah.

Lebih jauh, melalui pendekatan teori perilaku, pasar murah terbukti tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga membentuk perubahan perilaku

masyarakat ke arah yang lebih adaptif, rasional, dan tahan terhadap tekanan ekonomi. Hal ini menempatkan pasar murah sebagai bentuk kebijakan berbasis perilaku (*behavioral policy*) yang efektif dalam merespons dinamika sosial ekonomi.

Secara spasial, efektivitas kebijakan ini menunjukkan variasi antar wilayah, dimana dampak terbesar dirasakan pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Karangasem dan Buleleng. Temuan ini menegaskan bahwa kemiskinan di Bali bersifat kewilayahan, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang berbasis wilayah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pasar murah merupakan instrumen kebijakan yang strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2026, 5 Februari). Profil Kemiskinan Provinsi Bali September 2025. BPS Provinsi Bali.
- Berita Resmi Statistik No.13/02/51/Th.XX 5 Februari 2026.
- Béné, C., Prager, S. D., Achicanoy, H. A. E., Toro, P. A., Lamotte, L., Bonilla, C., & Mapes, B. R. (2019). Global map and indicators of food system sustainability. *Scientific Data*, 6, 279. <https://doi.org/10.1038/s41597-019-0301-1>
- Costlow, L., Gilbert, R., Masters, W. A., Ortenzi, F., Beal, T., Deo, A., Sutiyo, W., Noor, S., & Gonzalez, W. (2025). Healthy diets are affordable but often displaced by other foods in Indonesia. *Food Policy*, 130, 102769.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Faharuddin, F., Yamin, M., Mulyana, A., & Yunita, Y. (2023). Impact of food price increases on poverty in Indonesia: Empirical evidence from cross-sectional data. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 30(2), 126–142. <https://doi.org/10.1108/JABES-06-2021-0066>
- Harbers, M. C., Beulens, J. W. J., Rutters, F., de Boer, F., Gillebaart, M., Sluijs, I., & van der Schouw, Y. T. (2020). The effects of nudges on purchases, food choice, and energy intake or content of purchases in real-life food purchasing environments: A systematic review and evidence synthesis. *Nutrition Journal*, 19, 103. <https://doi.org/10.1186/s12937-020-00623-y>
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025.
- Mudana, I. G., Gusman, D., & Ardini, N. W. (2023a). Implementation of tri hita karana local knowledge in uluwatu temple tourist attraction, Bali, Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(11), 44. <http://dx.doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i11.4072>.
- Mudana, I. G., Ginaya, G., Gusman, D., & Ardini, N. W. (2023b). Kuta and the Implementation Of Cultural Tourism: The Popularity Of Beach Resort Strengthened By Balinese Art And Cultural Attraction. *Russian Law Journal*, 11(5), 1831-1848.

- Mudana, I. G., Suamba, I. B. P., Putra, I. M. A., & Ardini, N. W. (2018). Practices of Bali Tourism Development, Threefolding, and Tri Hita Karana Local Knowledge In New Order Indonesia. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 953, No. 1, p. 012108). IOP Publishing. <http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012108>.
- Mudana, I. G., Wijaya, I. N. C., Ginaya, I. G., Gusman, D., & Ardini, N. W. (2024). Application of Soft Systems Methodology Approach to Find Sustainable Gastronomic Solutions in Bali, Indonesia. *Academica Turistica-Tourism and Innovation Journal*, 17(2). <http://dx.doi.org/10.26493/2335-4194.17.179-194>.
- OECD. (2017). Behavioural insights and public policy: Lessons from around the world. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264270480-en>
- OECD. (2017). Use of behavioural insights in consumer policy. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 36. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/c2203c35-en>
- OECD. (2019). Delivering better policies through behavioural insights: New approaches. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/6c9291e2-en>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. (Cetakan ke). Alfabeta Bandung.
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2021). *Nudge: The final edition*. Yale University Press.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.
- World Bank. (2025). The World Bank's updated global poverty lines: Indonesia. World Bank.